

PERAN ULAMA DALAM MEMPROMOSIKAN DEMOKRASI DAN HAM DALAM MASYARAKAT

Aminuddin¹, Sarah Nasution²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

²Universitas Dharmawangsa

aminuddin@uinsu.ac.id dan sarahnasution@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas peran ulama dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) dalam masyarakat Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada keterlibatan ulama dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi pada demokrasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, serta upaya memperjuangkan HAM yang sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), menggunakan sumber-sumber jurnal nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berperan penting sebagai penjaga nilai demokrasi melalui fatwa, dakwah, dan pendidikan, serta sebagai advokat HAM dengan menekankan *maqashid al-syari'ah* dalam melindungi hak-hak dasar manusia. Tantangan yang dihadapi ulama mencakup masuknya paham radikal melalui globalisasi dan media sosial, serta dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Strategi yang dapat dilakukan antara lain melalui pendidikan formal dan nonformal, dakwah yang moderat, serta kolaborasi lintas agama. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ulama memiliki posisi strategis dalam memperkuat demokrasi Pancasila dan memastikan penghormatan terhadap HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara..

Kata Kunci: *Ulama, Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Masyarakat Islam*

Abstract

This study examines the role of Islamic scholars (*ulama*) in promoting democracy and human rights (HR) within Indonesian society. The focus of the analysis is directed toward the involvement of *ulama* in fostering public awareness to contribute to democratic development by integrating Islamic values, as well as their efforts to uphold human rights in accordance with the principles of social justice in Islam. The research employs a qualitative method with a library research approach, utilizing relevant national journal sources. The findings indicate that *ulama* play a significant role as guardians of democratic values through *fatwas*, preaching (*dakwah*), and education, as well as advocates for human rights by emphasizing *maqashid al-shari'ah* in protecting fundamental human rights. Challenges faced by *ulama* include the rise of radical ideologies through globalization and social media, as well as the dynamic socio-cultural

transformation within society. Strategies that can be implemented include formal and non-formal education, moderate preaching, and interfaith collaboration. The study concludes that *ulama* hold a strategic position in strengthening Pancasila-based democracy and ensuring respect for human rights in national and state life.

Keyword: Islamic Scholars, Democracy, Human Rights, Muslim Society

PENDAHULUAN

Perihal demokrasi dan Hak Asasi Manusia selalu menjadi minat untuk didiskusikan yang menjadikannya pembahasan yang tidak akan ada habisnya untuk dikaji. Dikarenakan demokrasi dan HAM ini merupakan dua hal yang menjadi dasar dalam prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Makna demokrasi yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan kedepannya melalui system perwakilan dan musyawarah. Sedangkan Hak Asasi Manusia sendiri dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat martabat dan kebebasan dasar setiap manusia.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam dan juga yang paling besar di dunia, menjadikan konteks antara nilai-nilai Islam, demokrasi, dan HAM sebagai isu yang terus timbul dalam perbincangan secara akademik maupun praktik sosial-politik. Dalam latar belakang pembahasan ini, ulama memegang posisi yang sangat strategis. Fungsi ulama tidak hanya sebagai ahli agama Islam yang mempunyai ilmu mendalam tentang agama, hukum Islam, Al-Qur'an, dan Hadis, serta untuk menjaga ilmu agama Islam dari kesesatan. Tanggung jawab dan fungsi ulama juga sebagai pembina dan penuntun umat. Ulama memiliki tanggung jawab untuk membina dalam bagian penentuan pola pikir individu yang mengakui ulama tersebut sebagai pemimpin. Ulama juga berperan sebagai penegak kebenaran yang menegakkan agama islam dengan ilmu-ilmu yang telah mereka ketahui. Memberikan petunjuk serta membimbing pengikutnya yang mengalami kebingungan, sesuai dengan yang Allah SWT. perintahkan dan ajaran Rasulullah Saw.¹

Konsep demokrasi menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, persamaan, dan kebebasan, memiliki korelasi erat dengan prinsip-prinsip HAM, antara lain seperti kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan dalma beragama, kesetaraan, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Demokrasi Pancasila memberikan kontribusi positif bagi penegakkan HAM karena membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan sekaligus memperkuat sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.²

Namun mengenai demokrasi dan HAM ini juga masih menimbulkan beberapa perdebatan oleh sebagian yang berpendapat bahwa demokrasi dan

¹ Muhammad Dafan Inada, Skripsi : *Pengaruh Ulama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kraksaan (Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Probolinggo Tahun 2008)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah (2009), h. 25.

² Very Irawan dkk., *Keterkaitan Ham Dengan Demokrasi Dalam Sistem Htn Di Indonesia*, Journal of Science and Social Research, vol. 7 no.1 (2024), h. 111.

HAM merupakan hasil dari pemikiran Barat. Maka, peran ulama adalah sebagai penengah dari perdebatan tentang itu dengan menjelaskan mengenai kesesuaian antara dua hal tersebut dengan ajaran agama Islam. Di sinilah urgensi untuk mengkaji lebih dalam tentang bagaimana peran ulama untuk mempromosikan demokrasi dan HAM di tengah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan fenomena tersebut, kajian tentang ini berfokus kepada bagaimana keterlibatan peran ulama dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam demokrasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam prinsip demokrasi modern, serta hal apa yang berkemungkinan menjadi tantangan juga strategi yang dapat dilakukan ulama dalam memperjuangkan nilai-nilai HAM. Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui ketelibatan peran ulama dalam praktik demokrasi di masyarakat Indonesia, memperjuangkan nilai-nilai HAM, serta mengidentifikasi kemungkinan tantangan yang dihadapi juga strategi yang bisa dilakukan ulama dalam mempromosikan demokrasi dan HAM di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) dalam menganalisis terhadap peran ulama tentang korelasi dari konsep demokrasi dan HAM dengan nilai-nilai Islam. Data dikumpulkan melalui kajian jurnal nasional yang relevan dengan topik peran ulama, demokrasi, dan HAM. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan gagasan utama dari literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ulama Sebagai Penjaga Nilai Demokrasi

Kata demokrasi yang secara etimologi dikenal berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *kratos* berarti kekuasaan atau pemerintahan. Maka demokrasi didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Konsep demokrasi juga terdapat dalam perspektif agama Islam. Dalam Islam, konsep demokrasi selaras dengan penafsiran tentang prinsip *syura* (musyawarah), juga konsep *ijtihad* dan *ijma* (konsensus). Prinsip kebebasan demokrasi dalam Islam berpijak pada nilai-nilai musyawarah (*al-syura*), keadilan (*al-'aladah*), dapat dipercaya (*al-amanah*), tanggung jawab (*al-masuliyah*) serta kebebasan (*al-hurriyyah*). Nilai-nilai ini telah dipraktikkan sejak masa kepemimpinan Nabi dan menjadi landasan dalam sistem kekhalifahan selanjutnya.³

Sejarah menunjukkan bahwa umat Islam dan masyarakat madani di Indonesia juga sudah berperan besar sejak sebelum kemerdekaan. Di situasi tersebut, organisasi Islam dan Nasional menjadi kendaraan terhadap lahirnya kemerdekaan. Ulama sebagai bagian dari masyarakat yang meneruskan peran tersebut melalui fungsi strategis dengan mengeluarkan fatwa, menjaga nilai-nilai

³ Febri Aulia dkk., *Politik, Demokrasi Dan Ham Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, Vol.1, No. 2 (2023), h. 458-459.

moral bangsa, serta menjadi penengah antara umat, negara, dan pemerintahan.
4

Peran ulama disini dapat dikategorikan sebagai ekspresi politik Islam. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama mempunyai relevansi terhadap tata kelola negara. Melalui fatwa-fatwa tersebut ulama memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus memberikan arahan moral-politik bagi masyarakat dan negara.⁵

Ulama dan Advokasi HAM

Berbeda dengan konteks demokrasi yang terkadang masih menimbulkan perdebatan diantara para ahli dan aktivis Islam, istilah mengenai hak asasi manusia (HAM) ini masih lebih mendapatkan penerimaan. Walau secara keseluruhan konsep dalam perspektif Islam yang dikemukakan tidak seutuhnya persis dengan konsep secara liberal. Hal ini diawali oleh keberadaan HAM sudah di akui sejak awal sejarah Islam di mulai.

Para ulama di masa lalu telah merumuskan tentang konsep HAM yang dijelaskan dalam pandangan Islam disebut *maqashid al-syari'ah* atau tujuan syari'ah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia dengan melindungi hal-hal yang menjadi *dharuriyyat* (keniscayaan) mereka, juga memenuhi hal-hal yang menjadi kebutuhan dan *tahsiniiyyat* (hiasan) mereka. Ada 5 prinsip dasar yang terdapat pada teori *maqashid al-syari'ah* ini, yaitu: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl*.⁶ Beberapa dari intelektual muslim yang mencoba memahami konsep HAM secara lebih kritis, agar dapat mengharmonisasikan antara Islam dengan HAM selogis mungkin dengan konsisten memakai metodologi yang telah disepakati oleh ulama, dan melakukan penafsiran ulang atas hal-hal yang secara lahiriah memiliki pertentangan, secara filosofis dan sosiologis.⁷

Keterlibatan ulama sangat penting dalam membimbing dan memberikan validitas dengan melakukan penyuluhan mengenai HAM kepada masyarakat. Pengaruh yang dimiliki tokoh agama terhadap komunitas Muslim sangat besar untuk memberikan penjelasan tentang nilai-nilai HAM yang sejalan dengan islam. Melalui dorongan dari tokoh agama ini masyarakat dapat lebih menerima dan terbuka atas informasi baru tentang HAM.⁸

Pengalaman konflik di Aceh menunjukkan bahwa pemuka agama turut memberikan kontribusi penting dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Kadayifci-Orellana yang terdapat di salah satu bab dalam bukunya, membicarakan mengenai kualitas dari pemuka agama yaitu pertama, pemuka agama memiliki kewenangan untuk menafsirkan teks keagamaan secara sah, dipandang adil dan tulus, serta memiliki otoritas moral-spiritual yang menumbuhkan rasa hormat dan kepatuhan dari masyarakat. Kedua, pemuka

⁴ Ramdhan Muhaimin1 & J. M. Muslimin, *The Role of the Council of Indonesian Ulama (MUI) to the Development of a Madani Society in the Democratic Landscape of Indonesia*, Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, Vol. 14 No. 2, (2023), h. 231-232.

⁵ Ramdhan Muhaimin1 & J. M. Muslimin, h. 234.

⁶ Masykuri Abdillah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia*, jurnal MIQOT, Vol. 38 No. 2 (2014), h. 379.

⁷ Masykuri Abdillah, h. 380.

⁸ Samsul Munir dkk, *Penyuluhan Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Ngaliman: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 3, No. 2 (2024), h. 119.

agama mampu menghadirkan nilai iman, takdir, kesabaran, dan perdamaian untuk membantu memberikan dukungan emosional dan psikologis sesuai dengan kondisi umat. Ketiga, pemuka agama memiliki jaringan jamaah dan organisasi keagamaan yang kuat, sehingga dapat menggerakkan sumber daya jangka panjang untuk membangun dan menjaga perdamaian.

Beberapa peran pemuka agama dalam penyelesaian konflik tersebut yaitu mulai dari mengubah pola pikir dan menyembuhkan trauma, menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan HAM, mengorganisir sumber daya manusia yang berkomitmen untuk memperjuangkan perdamaian, menentang struktur yang tidak adil dan mendukung tindak kekerasan dengan penafsiran teks-teks agama secara progresif dan inklusif, sampai menjadi mediator yang efektif berkat legitimasi moral dan sosial yang dimiliki oleh pemuka agama.⁹

Dengan demikian kehadiran pemuka agama seperti para ulama tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai spiritual, tetapi juga sebagai agen perdamaian yang mampu memjabatani kesenjangan sosial dan psikologis dalam masyarakat. Kualitas yang mereka miliki menjadikan peran mereka sangat strategis. Oleh karena itu, keterlibatan pemuka agama dalam advokasi HAM menjadi sebuah kebutuhan untuk memastikan terciptanya harmoni sosial.

Tantangan dan strategi ulama dalam demokrasi dan HAM

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam mempromosikan demokrasi dan HAM diantaranya: pertama, di era globalisasi saat ini melalui teknologi dan media sosial, dapat menyebabkan masuknya berbagai paham keagamaan yang eksklusif dan intoleran seperti radikalisme. Kedua, adanya perubahan sosial dan budaya di masyarakat mengharuskan ulama untuk mampu memahami perubahan tersebut agar dapat menyesuaikan cara dakwah agar tetap relevan.¹⁰

Dengan memperhatikan tantangan tersebut, jelas bahwa ulama memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga agar nilai-nilai demokrasi dan HAM dapat tetap hidup dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial dan derasnya arus globalisasi di masa saat ini tidak hanya sebagai penghalang, melainkan dapat dijadikan peluang dalam mempromosikan demokrasi dan HAM di masyarakat.

Strategi yang dapat dilakukan oleh ulama diantaranya yaitu pertama, strategi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal seperti menyiarkan paham keagamaan moderat dengan membuat klasifikasi kelompok sasaran, terutama generasi muda.¹¹ Kedua, dalam bidang penyiaran yaitu melalui dakwah secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat, serta melalui jalur politik dengan sasaran elit politik, birokrat, dan pelaku usaha. Ketiga, strategi juga dapat dilakukan melalui pendekatan lintas-agama dengan membentuk forum lintas-agama.¹² Dengan strategi yang tepat, ulama tidak hanya mampu meredam pengaruh paham radikal, melainkan juga memastikan bahwa prinsip keadilan,

⁹ Ikhwan, *Peran Ulama dalam Resolusi Konflik di Aceh*, Seminar Nasional UIN Imam Bonjol Padang (2022), h. 6.

¹⁰ Samsul Munir dkk, h. 57.

¹¹ Moh. Bahrudin, *Peran Ulama Nabhdlatul Ulama Dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat Di Provinsi Lampung*, Analisis, Vol. 3, No.1 (2017), h. 45.

¹² Moh. Bahrudin, h. 60-61.

kebebasan, dan persamaan akan terus mengakar dalam praktik kehidupan berbangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ulama memiliki peran sentral dalam mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia(HAM) ditengah masyarakat Indonesia. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai ppenjaga nilai-nilai agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan nilai demokrasi modern. Melalui fatwa, dakwah, dan pendidikan, ulama mamapu menjaga keseimbangan antara ajaran Islam dan praktik kehidupan berbangsa. Selain itu, keterlibatan ulama dalam advokasi HAM memperlihatkan bahwa nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Meski demikian, ulama menghadapi tantangan globalisasi, radkalisme, serta perunahan sosial budaya yang menuntut strategi dakwah yang adaptif. Strategi yang dapat dilakukan meliputi penguatan pendidikan moderat, penyiaran melalui dakwah lintas lapisan masyarakat, serta pendekatan lintas agama untuk membangun harmoni sosial. Dengna demikian, peran ulama tetap relevan dan sangat strategis dalam memperkuat fondasi demokrasi sekaligus menjunjung HAM di Indonesia

REFERENSI

- Abdillah, M. (2014). Islam dan hak asasi manusia: Penegakan dan problem HAM di Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 38(2), 379–380.
- Aulia, F., et al. (2023). Politik, demokrasi dan HAM dalam perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(2), 458–459.
- Bahrudin, M. (2017). Peran ulama Nahdlatul Ulama dalam menyiarkan paham keagamaan moderat di Provinsi Lampung. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 43–61.
- Ikhwan. (2022). Peran ulama dalam resolusi konflik di Aceh. *Seminar Nasional UIN Imam Bonjol Padang*, 6.
- Inada, M. D. (2009). *Pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat Kraksaan (Studi kasus pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2008)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
- Irawan, V., Desiandri, Y. S., dkk. (2024). Keterkaitan HAM dengan demokrasi dalam sistem HTN di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, 7(1), 111.
- Muhaimin, R., & Muslimin, J. M. (2023). The role of the Council of Indonesian Ulama (MUI) to the development of a madani society in the democratic landscape of Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 14(2), 231–234.
- Munir, S., et al. (2024). Penyuluhan tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam. *Ngaliman: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 119